

**PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM IMPLEMENTASI
PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

*The Role of Agricultural Extension Officers in the Implementation Of Subsidized
Fertilizer Distribution Through Farmer Cards in Kedungjajang District
Lumajang Regency*

Fenti Yunita¹, Ria Angin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jember

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail: ¹fentiunita614@gmail.com, ²ria.angin@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sektor pertanian yang luas. Luasnya sektor pertanian menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Pertanian memiliki peranan penting dalam poros pemerataan pembangunan. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Peran penyuluh pertanian sebagai pelaksana teknis program yang dilaksanakan pemerintah untuk mendampingi petani memperoleh pupuk bersubsidi. Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan serta informasi terkait pertanian. Pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani merupakan salah satu cara untuk menjamin kebutuhan pupuk bersubsidi petani terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran penyuluh dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Fokus penelitian ini terkait peran penyuluh pertanian beserta implementasi program kartu sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian ini dengan menggunakan konsep peran Soerjono Soekanto dan teori model implementasi Merilee S. Grindle. Fakta menunjukkan bahwa peran yang dimiliki aktor pelaksana sangat penting sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan dengan baik di Kecamatan Kedungjajang.

Kata Kunci : Peran, Penyuluh Pertanian, Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a large agricultural sector. The breadth of the agricultural sector makes Indonesia dubbed as an agricultural country. Agriculture has an important role in the axis of equitable development. Subsidized fertilizer is one of the government's steps to assist farmers in increasing agricultural productivity. The role of agricultural extension workers as technical implementers of programs implemented by the government to assist farmers in obtaining subsidized fertilizers. Agricultural instructors provide counseling to farmers to increase knowledge and information related to agriculture. The distribution of subsidized fertilizers through farmer cards is one way to ensure that farmers' subsidized fertilizer needs are met. The purpose of this

study is to explain the role of extension workers in the distribution of subsidized fertilizers through farmer cards in Kedungjajang District, Lumajang Regency. The focus of this research is related to the role of agricultural extension workers and the implementation of the card program as a means of redeeming subsidized fertilizers. This research was conducted using a qualitative descriptive method. The results of this study use the concept of Soerjono Soekanto's role and the implementation model of Merilee S. Grindle's theory. The facts show that the role of implementing actors is very important so that the distribution of subsidized fertilizers goes well in Kedungjajang Regency.

Keywords: Role, Agricultural Extension, Subsidized Fertilizer, Farmer Card

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sektor pertanian yang luas sebagian besar wilayah digunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian. Sektor pertanian sendiri memiliki lima sub sektor diantaranya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Produk pertanian yang paling menonjol di Indonesia yakni beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 provinsi Jawa Timur menjadi provinsi penghasil padi terbesar yakni mampu memproduksi padi sebanyak 9,90 juta ton gabah kering giling. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menganggarkan untuk membantu petani di bagian pupuk. Pupuk menjadi salah satu aspek penting dalam pertanian karena dengan pupuk tanaman pertanian maupun perkebunan dapat tumbuh dengan baik. Pembagian pupuk bersubsidi kepada petani harus

memenuhi enam prinsip utama yang sudah disusun. Keenam prinsip tersebut diantaranya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terus dilakukan kementerian pertanian bersama pemerintah daerah agar pupuk yang didistribusikan sampai kepada petani.

Pupuk menjadi aspek yang sangat penting maka tidak dipungkiri bahwasannya pupuk yang terjual terkadang melebihi kuota yang telah ditetapkan sehingga ada kekosongan stok di toko maupun kios. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam salah satu cara yang ditempuh yakni mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

Pengawasan. Untuk menekan kerugian petani akibat pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan maka pemerintah memberikan solusi dengan meluncurkan kartu tani. Kartu tani merupakan salah satu produk program pemerintah yakni dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai wujud kepedulian kepada petani. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar terbentuknya kartu tani.

Kegunaan dari kartu tani tersebut salah satunya untuk mendata dan menyusun kebutuhan petani akan pupuk sehingga diharapkan tidak akan lagi kelangkaan pupuk di kios dan pengecer. Petani yang tergabung dalam kelompok tani akan menyusun rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Nama petani yang termasuk dalam RDKK akan secara otomatis menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Pupuk bersubsidi dengan penggunaan kartu tani merupakan hal baru bagi petani sehingga perlu adanya penyesuaian. Kegunaan kartu tani sama halnya dengan kartu ATM yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari –

hari, namun letak perbedaannya kartu tani tidak bisa digunakan disembarang tempat ada alat khusus untuk menggunakan kartu tani tersebut. Penggunaan kartu tani hanya bisa dilakukan ditempat penebusan pupuk bersubsidi dalam hal ini adalah kios atau pengecer resmi.

Penyuluh pertanian sebagai pelaksana teknis dari program – program yang dijalankan pemerintah. Penyuluh pertanian termasuk dalam penghubung komunikasi dari petani kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Keberhasilan sebuah program tidak lepas dari peran orang – orang yang berada didalamnya. Melihat fenomena yang terjadi di lingkungan petani yang berada di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang maka dari itu penyuluh pertanian perlu mengambil peran dalam mendampingi para petani untuk memahami dan mengerti tentang pendistribusian pupuk bersubsidi yang menggunakan mekanisme baru yakni dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi bagi petani diharapkan dapat mempermudah perolehan pupuk dari pemerintah.

Penyuluh pertanian harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan edukasi di sektor pertanian. Perolehan pupuk bersubsidi pada saat ini kuota perolehan pupuknya harus berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan RDKK yang telah dilakukan bersama – sama kelompok tani dengan didampingi oleh penyuluh pertanian untuk jatah pupuk selama satu tahun kedepan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran penyuluh pertanian. Sesuai permasalahan yang ditemukan oleh peneliti maka untuk penelitian ini mengangkat judul “Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan

Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

2. Bagaimana implementasi program kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang serta untuk mengetahui implementasi program kartu tani di lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Menurut Ralph Linton yang dikutip Soerjono Soekanto (2002:243) mengartikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan (*role*) sangat penting karena ia mengatur perilaku seseorang. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan didalam pola kehidupan bermasyarakat. Hubungan sosial yang

berada dilingkungan masyarakat adalah hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur dalam norma yang berlaku. Peranan yang ada didalam diri seseorang akan dibedakan dalam pergaulan di masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam berorganisasi. Soerjono Soekanto menjelaskan tentang tiga kategori peran yakni peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif berikut penjelasan dari masing – masing peran yaitu :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh sekelompok anggota lantaran posisi yang dimiliki. Posisi tersebut berkaitan langsung dengan aktifitas kelompok misalnya pengurus dan pejabat.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan sekelompok anggota kepada seseorang karena sumbangan yang telah diberikan. Dengan harapan sumbangan tersebut dapat berguna untuk dirinya dan kelompok.
3. Peran pasif adalah peran yang tidak dilaksanakan atau dijalankan oleh seseorang. Peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam

keadan tertentu. Peran pasif memberikan peluang kepada hal yang lain didalam kelompok sehingga tetap berjalan dengan baik.

Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian adalah setiap orang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani guna meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjelaskan bahwa penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Beberapa istilah yang ada dalam pekerjaan penyuluh antara lain

- a. Penyuluh pegawai negeri sipil merupakan penyuluh yang tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dilingkup satuan organisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memberikan penyuluhan.
- b. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari pihak swasta atau pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang penyuluhan.

c. Penyuluh swadaya merupakan penyuluh yang secara sukarela dan mampu memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat lainnya.

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyaluran mendapat bantuan dari pemerintah. Subsidi pupuk ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pengadaan dan penyaluran pupuk ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 ada beberapa jenis pupuk yakni pupuk ZA, urea, SP-36, NPK, NPK formula khusus, pupuk organik granul dan pupuk organik cair. Pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan kepada petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK.

Kartu Tani

Kartu tani merupakan kartu yang dikeluarkan pihak perbankan yang

ditujukan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi memperoleh pupuk dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Kartu tani bertujuan untuk memudahkan petani dalam melakukan penebusan pupuk bantuan dari pemerintah. Dengan hadirnya kartu tani ini petugas pertanian juga dengan mudah mengetahui produksi lahan di suatu daerah. Selain itu bantuan yang disalurkan melalui kartu tani lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan hadirnya kartu tani diharapkan memiliki kebermanfaatan dan keuntungan yang besar bagi petani dan juga pemerintah. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan kartu tani yaitu : kemudahan dalam mendata jumlah petani, transparansi bantuan dana subsidi, penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan, mengetahui produktivitas dan potensi panen lahan pertanian, peran serta stakeholder lainnya.

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa implementasi berarti pelaksanaan dan penerapan. Tachjan berpendapat implementasi secara etimologi merupakan aktivitas

yang berkaitan dengan penyesuaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat atau sarana untuk mendapatkan sebuah hasil (Tachjan, 2006, hal 24). Model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle menjelaskan implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan (*content of policy*) harus menggambarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh program, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuatan keputusan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang digunakan. Konteks kebijakan (*context of implementation*) terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Perbedaan dari isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of implementation*) terletak pada pengaruh yang dimiliki.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian dengan metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini terletak pada peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani serta implementasi program tani.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan tertanggal 25 Maret 2022 hingga 25 April 2022. Lokasi penelitian ini dipilih karena memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan data dan informasi terkait peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

Sumber Data

Data primer berupa hasil wawancara dan observasi dengan informan langsung di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), "Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data”. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain : wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini yakni penyuluh pertanian yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan beberapa komponen yakni: pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:324) terdapat empat kriteria keabsahan data, yaitu: Derajat Kepercayaan, Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*confirmability*).

Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain penelitian ini dapat di recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu, dan berbagai cara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyuluh Pertanian

Pada pembahasan di BAB IV ini, peneliti akan membahas tentang peran dari penyuluh pertanian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani dengan menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002).

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang berkaitan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peran aktif dapat dilihat atau dinilai dari kontribusinya terhadap suatu kelompok. Penyuluh pertanian dalam hal ini memiliki tugas dan fungsinya sebagai pendamping kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK). Penyuluh pertanian berinteraksi secara langsung kepada kelompok tani untuk menyerap kebutuhan akan pupuk bersubsidi. Pendampingan yang dilakukan penyuluh pertanian bertujuan agar penyusunan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi bertujuan untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan azas tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga. Mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan secara berjenjang dari desa/kelurahan sampai ke tingkat pusat. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tersebut digunakan sebagai dasar usulan untuk kebutuhan pupuk yang akan datang sekaligus sebagai data pemesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur resmi pupuk bersubsidi.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan sekelompok anggota kepada seseorang karena sumbangan yang telah diberikan. Sumbangan yang diharapkan dapat berguna untuk dirinya

dan kelompok. Pada penelitian ini bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh penyuluh pertanian kepada petani berupa jasa. Jasa yang diberikan penyuluh pertanian yakni berupa penyuluhan kepada petani. Sosialisasi yang berikan kepada petani diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan dan program penyuluhan. Sosialisasi tentang pupuk bersubsidi, kartu tani hingga kartu organik dilakukan oleh penyuluh untuk petani dengan harapan informasi dapat tersampaikan secara jelas dan sesuai dengan tujuan. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) menjelaskan kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan serta berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilaksanakan atau dijalankan oleh seseorang. Peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam keadaan tertentu. Peran pasif memberikan peluang

kepada hal yang lain didalam kelompok sehingga tetap berjalan dengan baik. Peran dari penyuluh pertanian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dalam hal ini adalah sebagai pemantau pelaksanaan. Pendistribusian pupuk bersubsidi sepenuhnya menjadi tanggung jawab distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi. Kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri untuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (persero) yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian kerja dengan Kementerian Pertanian. Pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan tertutup melalui produsen kepada distributor untuk selanjutnya disalurkan kepada pengecer. Pengecer resmi pupuk bersubsidi adalah pengecer yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data yang ada di e-RDKK.

Implementasi Program Kartu Tani

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang memiliki peranan penting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan dari kebijakan publik yang dirumuskan tidak lepas dari bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilapangan. Proses

implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Analisis implementasi kartu tani peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980).

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. Kepentingan yang memengaruhi Program kartu tani dijalankan berdasarkan Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai bentuk penjaminan pemerintah kepada petani untuk bantuan disektor pertanian dapat diterima langsung oleh petani.
2. Tipe Manfaat Manfaat dari adanya kartu tani kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani akan lebih terjamin dan memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di daerah.
3. Derajat Perubahan Yang Diharapkan Derajat perubahan yang diharapkan dalam pelaksanaan implementasi program kartu tani ini yakni petani mulai beradaptasi dengan tata

kelola pendistribusian pupuk bersubsidi yang baru dimana pembayaran beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran melalui kartu

4. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan terkait implementasi kartu tani di tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan berada di dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Keputusan diambil setelah melakukan pembahasan terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada dilapangan dan di diskusikan bersama pihak – pihak yang terlibat.

5. Pelaksana Program

Pelaksana program kartu tani dalam hal ini penyuluh pertanian beserta pihak perbankan.

6. Sumber Daya Yang Terlibat

Grindle menjelaskan implementasi kebijakan dapat berlangsung jika sudah ada dana yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan. Sumber daya yang terlibat yakni sumber daya manusia dan sumber daya pendukung seperti anggaran. Pelaksanaan program kartu tani didukung melalui APBN

dan APBD daerah pada bagian sektor pertanian.

b. Konteks Implementasi (Context of Implementation)

1. Kekuasaan, kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat

Aktor yang terlibat terkait program kartu tani berada dekat dengan petani. Penyuluhan berupa sosialisasi sebagai salah satu strategi yang dilakukan para aktor untuk memberikan informasi kepada petani terkait program kartu tani. Sosialisasi dilakukan selain untuk memberikan informasi melainkan untuk memfasilitasi petani untuk memperoleh kartu tani.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagai pihak yang memberikan keputusan terkait pelaksanaan kartu tani sekaligus dinas yang memimpin koordinasi dari lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat. Dinas Perdagangan bertindak sebagai pihak yang melakukan pengawasan terkait program kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi. Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang dalam hal ini penyuluh pertanian bertindak sebagai pihak yang berada langsung dengan petani untuk menyerap segala permasalahan yang terjadi dilapangan untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada dinas.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari masing – masing aktor yang terlibat menjadi kunci sukses dari pelaksanaan program. Koordinasi dan kerjasama yang baik akan menimbulkan dampak yang positif. Hal ini terlihat dari mayoritas petani yang ada di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang sudah memiliki kartu tani.

Prediksi terkait isi kebijakan dan konteks implementasi tidak semuanya terbukti dilapangan. Fakta dilapangan menunjukkan aktor yang terlibat dalam program kartu tani ini meliputi beberapa aktor. Setiap indikator masih dipengaruhi oleh faktor lain terlebih lagi program kartu tani masih belum terimplementasi di wilayah

kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang. Program kartu tani yang belum terimplementasi menjadi temuan peneliti dilapangan. Teori Grindle menjelaskan bahwa konteks implementasi menjadi salah satu penentu keberhasilan kebijakan tidak terbukti. Kartu tani yang menjadi konteks kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak terlaksana dengan berbagai alasan. Namun, dalam penelitian ini pupuk terdistribusikan dengan baik kepada petani. Jadi pada hemat peneliti, keberhasilan suatu implementasi kebijakan bukan dikarenakan konten kebijakan melainkan peran aktor pelaksana yang meliputi penyuluh pertanian, distributor dan kios atau pengecer resmi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran dari penyuluh pertanian sebagai salah satu pelaksana teknis program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sangatlah penting. Penyuluh pertanian sebagai pihak yang berada dekat dengan petani sehingga permasalahan yang

sedang dihadapi maupun keluhan – keluhan dari petani dapat tersampaikan. Peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif penyuluh pertanian sama – sama berjalan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh sehingga aspirasi dari petani dapat tersalurkan dengan baik. Keberhasilan implementasi program yang dibuat dapat terlihat dari *outcomes* atau proses pencapaian hasil akhir. Implementasi program kartu tani merupakan langkah baik dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membenahi sistem tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi. Namun, pelaksanaan dilapangan tidak semudah itu untuk dilaksanakan hal ini juga yang terjadi di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungjajang karena kartu tani belum di implementasi sehingga keberhasilan pelaksanaan belum bisa dijabarkan secara mendetail. Namun, pupuk bersubsidi terdistribusikan dengan baik di Kecamatan Kedungjajang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bukan dikarenakan

konteks kebijakan melainkan peran aktor pelaksana yang meliputi penyuluh pertanian, distributor dan kios atau pengecer resmi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat disimpulkan sesuai dengan peran penyuluh pertanian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang beserta implementasi program kartu tani yakni : Kepada penyuluh pertanian yang memiliki peranan yang penting dan pengaruh tersendiri kepada petani. Berada dekat dengan petani menjadikan penyuluh pertanian sebagai pihak yang lebih mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan. Penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh pertanian harus berkembang seiring kebutuhan yang diperlukan petani. Pemberian informasi dan pengetahuan kepada petani untuk mewujudkan petani yang cerdas sehingga produktivitas pertanian meningkat.

Daftar Pustaka

- AIPI. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Arkanudin Rizki Permono, Vincent Hadi Wiyono, L. H. (2020). Peran

- Penyuluh Pertanian Swadaya Dalam Mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Akibat Perkembangan Kawasan Solobaru Kabupaten Sukoharjo. 01(08), 69–75.
- Fatma Anisa, M F. A. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago , Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Padang Sago merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang. 5(4), 1137–1150.
- Grindle, M. S. (1980). *Police And Policy Implementation In The Third World*. Princeston University Press.
- Nela Inna Nurgulina. (2021). Pola komunikasi penyuluh pertanian dengan kelompok tani di kecamatan air kumbang kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan.
- Ni Putu Istri Padmaswari, Nyoman Sutjipta (2018). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai Fasilitator Usahatani Petani di Subak Empas Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. 7(2), 277–285.
- Rahayu, S. W. (2021). Pertanian, Pengaruh kompetensi penyuluh terhadap efektivitas pelaksanaan program kartu tani. 1(12), 1361–1369.
- Roni, Y., & Setyawan, D. (2020). Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi. 9(1), 73–80.
- Sianturi, N. L. M. (2019). Peran Penyuluh Dalam Pengembangan Kelompok tani Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Politeknik Pembangunan Medan, 75.
- Syarief Nurdin, Encep. 2019. *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. ALFABETA.
- Wardani, O. A. (2018). *Education Role Of Strengthening Of Land Groups And Farmers Regeneration In Bogor Regency*. 2(1), 191–200.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 04/kpts/RC.210/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan	https://pertanian.lumajangkab.go.id/halaman/sigarpunbulat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian	https://pertanian.lumajangkab.go.id/dapoktan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021	https://ppid.semarangkota.go.id/cara-membuat-kartu-tani/ http://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	